



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.725, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN.
Sekolah. Pertanian. Pedoman.

Pendidikan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/PERMENTAN/OT.140/5/2013
TENTANG
PEDOMAN SEKOLAH LAPANGAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan bagi petugas dan pelaku utama kegiatan pertanian, upaya yang telah dilakukan antara lain dengan model pendidikan dan pelatihan melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT);
- b. bahwa dalam perkembangannya pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan telah melakukan Sekolah Lapangan melalui pelatihan di bidang teknologi *on farm* dan *off farm*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan agar dalam pengembangan dan penerapan model pelatihan Sekolah Lapangan dapat dilakukan secara sistematis, dan terukur, perlu menetapkan Pedoman Sekolah Lapangan Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4660);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
jika Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 141);